

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, cetakan 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Agus Budianto dkk, *Barcoding Digital Signature Authencity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, April 2021.
- Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022).
- Anthony D'Amato and Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, dalam Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007).
- AusAID, *Intellectual Property Rights. Indonesia-Australia Specialised Training Project-Phase II*, 2002.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sistem Klasifikasi Merek Dan Perkembangannya*.
- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017).
- Mahmud Peter, *Hukum Ekonomi dan Globalisasi. Bahan Ajar PPS Unair*. 3 Juni 2001.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Maria Alfons, *Tanggungjawab Pemerintah Atas Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2019)

Philippe Nonet & Philip Selznick, 2001, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers. Lihat juga Al. Wisnubroto, "Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim melalui Pemahaman Realitas Sosialnya" *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XX No. 1 Januari 2003, Bandung: FH UNPAR; baca juga Lintong O. Sia-haan, "Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di In-donesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 36

Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021).

Rika Ratna Permata dkk, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021).

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Suryansah dkk, *Merek Dagang Tingkatkan Ekonomi Kreatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).

Jurnal:

FX Adji Samekto, "Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.13 No.1, Januari 2013.

Kadek Yoni Vemberia Wijaya dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak Merek*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, 2018.

R Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, 2016.

Hasil Penelitian:

Gustianus Fernando, Tesis: *Implementasi asas first to file terhadap sengketa Merek terkenal di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2024).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1089)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *Jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Website/Internet:

Hukum Online, Risa Amrikasari, Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-Merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-1t5941f01d7fa0e/>, diakses pada 24 Mei 2024.

Hukum Online, Nafiatul Munawaroh, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-1t4d1cdbcf06b6/#\\_ftn4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-1t4d1cdbcf06b6/#_ftn4), diakses pada Minggu, 09 Juni 2024.

Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Permohonan Pendaftaran Merek*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-kekayaan-intelektual/permohonan-pendaftaran-Merek>, diakses pada 27 Februari 2024.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn, LL.M., CLA, CCD., Praktisi dan Konsultan HKI di MHANS LAW, Aplikasi Zoom, Tanggal 28 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Aplikasi Zoom, Tanggal 27 Mei 2024.